

Sekolah Sebagai Ruang Hegemoni Ideologis: Analisis Pendidikan Dalam Prespektif Antonio Gramsci

Alfi Lakhana Labib

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: alfilakhana.2023@student.uny.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran sekolah sebagai ruang hegemoni ideologis menurut perspektif Antonio Gramsci. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sekolah, melalui berbagai elemen seperti kurikulum, budaya, dan sistem evaluasi, memperkuat ideologi dominan yang mendorong nilai-nilai seperti meritokrasi, individualisme, dan kompetisi. Dalam pandangan Gramsci, pendidikan bukan hanya sekadar sarana transfer pengetahuan, melainkan juga alat untuk menyebarkan ideologi yang mempertahankan status quo, di mana ketidaksetaraan dan struktur kekuasaan tertentu sering dianggap "alami" dan sulit dipertanyakan. Meskipun demikian, meski berada dalam kerangka hegemoni ideologis, sekolah memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan reflektif, serta memperkuat peran guru sebagai intelektual organik, sekolah dapat berfungsi sebagai ruang untuk mengembangkan kesadaran kritis dan menentang hegemoni yang ada. Oleh karena itu, pendidikan memiliki kapasitas untuk mendorong transformasi sosial yang lebih adil dan menjadi alat untuk membangun blok historis yang lebih egaliter. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan pedagogik yang dapat mendukung perlawanan terhadap hegemoni ideologis dalam sistem pendidikan.

Keywords: Antonio Gramsci, Hegemoni ideologis, Kurikulum, Pendidikan, Transformasi sosial

PENDAHULUAN

Dalam wacana publik, pendidikan kerap dibayangkan sebagai ruang yang netral dan membebaskan. Namun, kajian-kajian kritis menunjukkan bahwa sekolah justru berperan sebagai arena penting reproduksi ideologi dan budaya kelas yang berkuasa. Konsep educational hegemony menjelaskan bagaimana sistem Pendidikan melalui kurikulum, mekanisme penilaian, dan budaya sekolah secara perlahan membentuk cara pandang peserta didik agar sejalan dengan kepentingan politik ekonomi tertentu (Cornelius-bell & Bell, 2024). Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan dan praktik kelembagaan erat terkait dengan agenda kekuasaan negara, mulai dari pengaturan sistem seleksi perguruan tinggi hingga

penyeragaman identitas kebangsaan. Alhasil, pendidikan beroperasi sebagai medium ideologis yang halus, bukan sekadar sarana pengembangan kapasitas individu (Hafidz, 2024).

Menurut Antonio Gramsci, gejala tersebut dapat dijelaskan melalui konsep hegemoni, yakni bentuk kepemimpinan politik di mana penguasa tidak hanya bertumpu pada dominasi, tetapi juga membangun persetujuan (domination dan consent) melalui institusi masyarakat sipil seperti sekolah, media, dan organisasi keagamaan. Melalui jaringan institusi ini, ideologi dominan disisipkan ke dalam *common sense* kehidupan sehari-hari sehingga struktur sosial yang timpang tampak alamiah dan jarang dipertanyakan (Buttigieg, 2025). Dalam kerangka tersebut, sekolah

bukan sekadar ruang transfer pengetahuan, melainkan bagian penting dari mekanisme hegemoni ideologis yang membentuk cara berpikir dan bertindak individu agar tetap sejalan dengan status quo, sebagaimana ditunjukkan dalam pembacaan atas gagasan Gramsci tentang schooling and education.

Kajian tentang teori hegemoni Antonio Gramsci dan relevansinya bagi dunia pendidikan sebenarnya sudah cukup berkembang. Namun, di konteks Indonesia, sebagian besar masih bertumpu pada analisis tingkat makro, seperti bagaimana negara mendominasi sistem pendidikan atau bagaimana ideologi penguasa bekerja melalui kebijakan dan praktik pedagogis tertentu. Penelitian yang secara khusus memosisikan sekolah sebagai “ruang hegemoni ideologis” dan mengurai secara rinci mekanisme internalnya melalui kurikulum, budaya sekolah, serta peran guru sebagai intelektual organik masih relatif sedikit, meskipun fondasi teoritisnya telah banyak dibahas dalam studi-studi mengenai anatomi teori Gramsci (Putri & Istiqomah, Mutia Hesti, Nayla Amara Kuncoro, 2025). Artikel ini ditulis untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah sekolah sebagai ruang hegemoni ideologis dalam perspektif pemikiran Gramsci melalui studi literatur terhadap karya-karya utamanya serta penelitian kontemporer tentang hegemoni dan pendidikan, sekaligus menyoroti potensi sekolah sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis dan praktik counter-hegemony.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur untuk menggali teori hegemoni Antonio Gramsci dan penerapannya dalam konteks pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk meneliti bagaimana sekolah dapat berfungsi sebagai ruang hegemoni ideologis. Artikel ini mengkaji karya-karya utama Gramsci yang membahas pendidikan dan hegemoni, serta literatur terkini yang relevan dengan topik ini. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan peran sekolah sebagai wadah untuk resistensi dan transformasi ideologis, dengan memperhatikan fungsi guru sebagai intelektual organik dalam membentuk kesadaran kritis di kalangan siswa. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai studi yang menghubungkan pendidikan dengan teori hegemoni Gramsci serta analisis sistem pendidikan di beberapa negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis literatur menunjukkan bahwa sekolah berperan penting dalam mereproduksi ideologi kelas dominan, terutama melalui mekanisme sosial dan budaya yang tidak terlihat. Sebagai contoh, penelitian yang menghubungkan pendidikan dengan konsep hegemoni Gramsci mengungkapkan bahwa sekolah adalah bagian dari "hegemoni ideologis" dalam masyarakat sipil. Dalam pandangan Gramsci, sistem pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi pemahaman umum yang mendukung struktur kekuasaan yang ada. Kurikulum, buku teks, rutinitas sekolah, dan sistem evaluasi, pada praktiknya, membentuk cara pandang

dunia yang dianggap “alami” oleh siswa. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dan relasi kekuasaan tertentu seringkali tidak dipertanyakan secara kritis. Temuan serupa juga diungkapkan dalam studi *Educational Hegemony: Anglospheric Schooling, Ideology and Culture*, yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan di negara-negara Anglosfer berperan dalam memperkuat ideologi dominan melalui institusi pendidikan (Cornelius-Bell & Bell, 2024). Dalam perspektif teori Gramsci, peran guru menjadi sangat penting dalam dinamika hegemoni. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar yang mentransmisikan pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai intelektual organik yang memiliki potensi untuk memperkuat maupun menantang hegemoni yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan sejatinya dapat menjadi sarana perubahan sosial apabila guru dan sekolah berperan aktif dalam membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap praktik dominasi. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah justru mereproduksi nilai-nilai dominan seperti individualisme, kompetisi, dan meritokrasi. Nilai-nilai tersebut disebarkan melalui kebijakan penilaian dan budaya sekolah, sehingga sering kali mengabaikan potensi pendidikan sebagai ruang perlawanan terhadap hegemoni yang ada (Torro et al., 2022).

Penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah memiliki potensi untuk berfungsi sebagai ruang resistensi dan transformasi ideologis. Sekolah yang mengadopsi pendekatan inklusif dan reflektif dapat menantang konstruksi normalitas yang diciptakan oleh hegemoni budaya pendidikan

(Yildiz & Ohnmacht, 2022). Dalam kerangka pemikiran Gramsci, hal ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru memiliki peran sebagai agen counter-hegemony, yaitu dengan memfasilitasi partisipasi, dialog kritis, dan literasi reflektif di kalangan siswa. Langkah ini pada gilirannya membuka ruang bagi pembentukan blok historis yang egaliter. Oleh karena itu, meskipun sekolah secara struktural terikat dalam mekanisme hegemoni ideologis, ia tetap memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan jika terdapat upaya sadar dalam pengembangan pedagogik dan kebijakan institusional yang mendukung.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Aracê dos Santos dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa teknologi pendidikan seperti e-learning, platform digital, dan instrumen penilaian online berpotensi menjadi sarana baru untuk menyebarkan hegemoni ideologis jika tidak dianalisis secara kritis (Nacílio et al., 2024). Artikel tersebut menyimpulkan bahwa teknologi ini dapat berfungsi sebagai “instrumen ideologis yang memperkuat penindasan dan ketimpangan sosial” dan dapat menempatkan guru sebagai pelaksana yang tidak sadar akan sistem hegemoni, apabila mereka hanya mengikuti logika teknologi tanpa adanya refleksi kritis. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: meskipun sekolah dan guru memiliki potensi sebagai agen perubahan sosial atau counter hegemony, penerapan teknologi tanpa kesadaran kritis justru bisa memperkuat nilai-nilai dominan seperti individualisme, kompetisi, dan meritokrasi yang serupa dengan mekanisme hegemoni tradisional. Oleh karena itu,

kebijakan institusional dan pedagogis yang mendukung literasi kritis terhadap teknologi harus menjadi bagian integral dari strategi perlawanan terhadap dominasi ideologi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Michael, 1993) Diakses pada 2025, mengungkapkan bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga sebuah arena ideologis di mana pengetahuan yang diakui secara resmi (official knowledge) dibentuk untuk memenuhi kepentingan kelompok dominan. Apple menyatakan bahwa kurikulum dan evaluasi yang diterapkan di sekolah berfungsi sebagai alat seleksi ideologi, yang menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah dan mana yang diabaikan. Akibatnya, lembaga pendidikan turut memperkuat struktur sosial yang terhierarki dan memperlakukan ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang terus berlangsung. Dalam konteks hegemoni, hal ini bisa dipahami bahwa sekolah berperan sebagai alat yang menjaga "konsensus" yang tidak terlihat, yang memelihara kestabilan struktur kekuasaan melalui internalisasi bukan hanya dengan paksaan, tetapi juga dengan cara normalisasi. Dalam kerangka ini, penting bagi guru dan sekolah untuk tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga untuk menyadari peran mereka dalam menghentikan siklus reproduksi ketidaksetaraan tersebut.

KESIMPULAN

Sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan dan berfungsi sebagai elemen kunci dalam mempertahankan struktur sosial melalui pengaruh ideologis yang sering kali

tersembunyi. Meskipun pendidikan cenderung memperkuat nilai-nilai dominan seperti individualisme dan meritokrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah juga bisa menjadi ruang untuk perubahan ideologis, dengan syarat pendekatan yang digunakan bersifat inklusif dan reflektif. Dalam hal ini, guru sebagai intelektual organik memiliki peran sentral dalam menantang kekuasaan dominan dan membuka peluang untuk perubahan sosial. Dengan demikian, meskipun pendidikan sering beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang lebih besar, ia tetap memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang signifikan.

Meskipun berada dalam struktur hegemoni ideologis, sekolah memiliki potensi untuk menjadi katalis perubahan sosial. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan reflektif serta memperkuat peran guru sebagai intelektual organik, sekolah dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan kesadaran kritis yang menentang hegemoni yang ada. Pendidikan dapat membuka jalan bagi transformasi sosial yang lebih adil dan berperan sebagai alat untuk membangun blok historis yang lebih setara.

Peran guru sebagai intelektual organik sangat penting dalam konteks ini. Selain berperan sebagai penyampai pengetahuan, guru memiliki tanggung jawab untuk membangkitkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik dominasi yang ada. Dengan mengadopsi pendekatan inklusif dan reflektif, sekolah dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang efektif. Transformasi ini dapat diwujudkan melalui penguatan

partisipasi aktif siswa, dialog kritis, dan pengembangan literasi reflektif. Oleh karena itu, meskipun beroperasi dalam sistem hegemoni ideologis, sekolah tetap memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan sosial yang lebih adil dan egaliter

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kritis pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buttigieg, J. (2025). *Gramsci and education*. Routledge.
- Cornelius-Bell, A., & Bell, P. A. (2024). Educational hegemony: Anglospheric education institutions and the potential of organic intellectuals. *Critical Journal of Education and Social Sciences*, 4(1), 49–62.
<https://doi.org/10.53103/cjess.v4i1.213>
- Hafidz. (2024). *Hegemoni negara terhadap dunia pendidikan: Telaah atas teori kritis Antonio Gramsci*.
- Michael W., A. (1993). The politics of official knowledge: Does a national curriculum make sense? *Teachers College Record*, 95(2), 222–241.
- Nacílio, A., Neto, J., Felipe, D. O., Kehler, S., Silva, Á. R., Mendes, G. B., Teixeira, L., Henrique, J., Machado, R., & Luengo, S. (2024). Education and technology: A critical look at technological education from the Gramscian and Marxist perspective. *[Nama jurnal tidak dicantumkan]*, 8150–8171.
- Putri, S. S., Istiqomah, M. H., Kuncoro, N. A., & D. S. (2025). Hegemoni kekuasaan dalam novel *Animal Farm* karya George Orwell (teori Gramsci). *Peneroka*, 5(2), 223–233.

<https://doi.org/10.30739/peneroka.v5i2.4149>

- Torro, S., Tamrin, S., Sadriani, A., Sunra, L., Kasim, N., Languange, D. E., & Makassar, U. N. (2022). The correlation between teacher's hegemony and students' critical thinking skills. *[Prosiding/Jurnal tidak dicantumkan]*, 01040.
- Yildiz, E., & Ohnmacht, F. (2022). Educational success despite school? From cultural hegemony to a post-inclusive school. *Journal of Education Policy*, 10(2), 313–323.